

BAB III

METODE PENELITIAN

Obyek penelitian ini adalah pelaksanaan desentralisasi Program KB di Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Barat. Sebagaimana diuraikan dalam pendahuluan, fenomena di kabupaten tersebut menarik untuk diteliti, yaitu apakah semangat otonomi daerah yang telah diberikan untuk mengelola urusan pemerintah di bidang KB dilaksanakan sesuai cita-cita desentralisasi yaitu memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

3.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisa kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan mendiskripsikan secara terperinci tentang fenomena-fenomena tertentu (Singarimbun, 1992) Penelitian kualitatif berusaha memahami dan mengungkapkan fenomena yang terjadi secara menyeluruh melalui pengumpulan data pada suatu latar ilmiah dengan metode alamiah, dan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci (Moleong, 2005) Dalam penelitian ini menurut Bungin (2004), proses kualifikasi terhadap data yang diperoleh tidak harus dilakukan. Data yang diperoleh akan di analisis serta didiskrisikan berdasarkan penemuan fakta-fakta lapangan.

Menurut Nawawi (1991), metode deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah, yang diselidiki dengan menggambarkan subyek atau obyek penelitian (seseorang, kelompok, lembaga), dilakukan pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya. Prosedur

penelitian deskriptif tersebut lebih bersifat menjelaskan, menggambarkan dan menfasirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan atau kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

3.2 Desain Penelitian.

Berdasarkan kajian pustaka, disusun disain penelian operasional yang diperlukan untuk menjawab fenomena yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi program KB dan kemampuan SKPD-KB melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dalam kaitan ini penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan program KB pada masa desentralisasi di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Barat dan kuantitatif untuk menggambarkan kemampuan SKPD-KB kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang dilihat dari hasil- hasil capaian pelaksanaan Program.

Pelaksanaan Program KB di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Barat dengan indikatornya :

1. Struktur Kelembagaan,

Dalam struktur kelembagaan akan diketahui berapa bidang dan seksi yang mengelola program KB serta garis komando dalam lembaga Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola program KB(SKPD-KB) Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Barat dan terhadap petugas lapangan yang ada.

2. Jumlah kegiatan untuk pengelolaan program KB yang bersumber dari APBD,
3. Jumlah tenaga pengelola program KB di tingkat lapangan (penyuluh KB) dan

4. Sarana-sarana yang dimiliki oleh kabupaten untuk mendukung pelaksanaan program KB tersebut.

Hasil-hasil capaian Program yang meliputi:

1. Jumlah Peserta KB aktif yaitu : pasangan usia subur yang sedang menggunakan alat kontraspasi per jenis kontrasepsi.
2. Jumlah peserta KB Baru (Perjenis kontrasepsi) yaitu: pasangan usia subur yang baru pertama kali menggunakan alat kontrasepsi atau setelah melahirkan.
3. Jumlah Pembinaan Keluarga Sejahtera yang terdiri dari :
 - a. Jumlah anggota dan anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB).
 - b. Jumlah anggota Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)
 - c. Jumlah anggota Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)
 - d. Jumlah Keluarga sesuai Tahapan Keluarga Sejahtera.
4. Capaian Pelaksanaan Stnandar Pelayanan Minimal (SPM)

3.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari data skunder dan primer. Data skunder adalah data yang diperoleh dengan cara melalui studi pustaka yang berupa Peraturan perundang-undangan, literatur dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan Program KB Nasional serta data-data yang bersumber dari statistik rutin baik yang dilakukan SKPD-KB Lampung Tengah dan Lampung Barat maupun yang dilakukan oleh BKKBN Provinsi Lampung seperti :

- a. Laporan bulanan yang terdiri dari laporan pelayanan kontrasepsi (Rek Kab. F/II/KB/2011) dan laporan pengendalian lapangan (Rek kab. F/I/kec-dall/2010).

- b. Laporan tahunan yaitu : laporan yang memuat potensi wilayah (Rek Kab. K/0/KB dan Rek Kab/ K/0 dallap)
- c. Laporan Laporan hasil pendataan keluarga tahun 2013

Sedangkan data primer bersumber dari wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Badan pada SKPD KB, Anggota Legeslatif, dan Ketua/Pengurus Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesesia (PKBI)di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Barat dengan asumsi bahwa ketiga narasumber tersebut mengetahui proses pelaksanaan program KB di kedua kabupaten tersebut.Hal-hal yang ditanyakan pada ketiga narasumber tersebut adalah:

- a. Bagaimana dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program KB
- b. Proses pelaksanaan program KB di kabupaten sampai di tingkat lapangan di masing-masing kabupaten (apa saja yang telah dilakukan).
- c. Hasil Pelaksanaan program KB di masing-masing Kabupaten
- d. Kendala yang ada alam pelaksanaan program KB.

3.4 Tehnik Pengumpulan Data

Data Skunder,data yang diperoleh melalui teknik dokumentasi. Dari teknik ini diperoleh data tentang :

Peraturan Perundang-undangan yang mendasari kedudukan instansi dan pelaksanaan program KB yang meliputi:

1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

3. Peraturan Daerah tentang pembentukan SKPD-KB Kabupaten/Kota
4. Dokumen-dokumen berupa pencatatan dan pelaporan pelaksanaan program Keluarga Berencana (statistik rutin).

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Nara sumber pada tahun 2013, di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Barat. Selain itu data primer juga diperoleh melalui wawancara dengan pihak legislatif, dan Pengurus PKBI atau pihak-pihak yang dianggap netral.

3.5 Pengolahan Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data melalui tahapan-tahapan sebagai berikut.

1. Editing, yaitu dengan cara melakukan pengecekan data secara teliti guna menghindari kesalahan.
2. Klasifikasi data, yaitu data yang telah terkumpul selanjutnya diklasifikasikan menurut pokok bahasannya masing-masing, dan pengolahan data ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dalam pengelompokan data.
3. Organizing, yaitu data yang telah terkumpul kemudian diurutkan sesuai dengan pengelompokannya sehingga akan sesuai dengan sistematika bahan.

3.6 Analisis Data

Data yang telah selesai diolah kemudian dianalisis secara:

1. Diskriptif yaitu memberikan gambaran arti dan interpretasi data, selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistimatis untuk kemudian ditarik kesimpulan. Data yang dianalisa dengan cara ini adalah data tentang pelaksanaan program baik yang di Lampung Selatan maupun di Lampung Barat dan didukung dengan hasil wawancara.
2. Kualitatif yaitu dengan cara memberikan persentasi terhadap capaian pengelolaan program yang menjadi tugas dan fungsi SKPD-KB dan selanjutnya menjelaskan secara diskriptif terhadap data kualitatif tersebut agar lebih bisa dimaknai, baik data di Kanupaten Lampung Tengah maupun di Lampung Barat.
3. Diskriptif kualitatif yaitu membandingkan data pelaksanaan Program KB dan hasil-hasil capaian program KB baik di Lampung Tengah maupun di Lampung Barat.

3.7 Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kebijakan publik model Merilee S. Grindle, yaitu analisis yang memusatkan perhatian pada bagaimana sebuah kebijakan dapat diimplementasikan secara baik dan tepat sasaran. Proses ini umumnya dilakukan dengan memilih dan mengamati sebuah kebijakan, dalam hal ini program KB dan menekankan pada aspek tertentu sehingga kebijakan kepala daerah dapat dinilai sebagai sebuah kebijakan publik.

Adapun input yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah berdasarkan hasil wawancara, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang intinya menekankan pada persoalan, seperti: Kepentingan apa yang mempengaruhi

implementasi kebijakan program KB? Apa manfaat implementasi kebijakan KB bagi pemerintah maupun bagi masyarakat? Sejuahmana derajat perubahan yang ingin dicapai dalam mengimplementasikan kebijakan program KB? Di mana letak pengambil kebijakan program KB yang akan diimplementasikan? Siapakah pelaksana kebijakan program KB yang akan diimplementasikan? Apa saja sumberdaya yang mendukung untuk mengimplementasikan program KB? Bagaimana pengaruh kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari pelaku program KB? Bagaimana karakteristik lembaga dan pengaruh lingkungan dalam mengimplementasikan program KB? Bagaimana tingkat kepatuhan dan respon pelaksana program KB?

3.8 Fokus dan Lokus Penelitian

Banyaknya informasi yang masuk tidak semua diakomodir dalam penelitian ini, kecuali yang berhubungan dengan fokus penelitian, yaitu perbandingan pelaksanaan program KB di era desentralisasi. Berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti memfokuskan untuk menganalisis data sekunder dan informasi atau wawancara dari narasumber. Fokus penelitian ini juga dimaksudkan untuk membatasi studi agar tidak bias pada persoalan lain.

Hal ini sesuai dengan pendapat Moleong yang mengatakan bahwa masalah pada penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Adapun maksud dalam merumuskan masalah penelitian, dengan jalan memanfaatkan fokus yaitu pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi; kedua,penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang diperoleh di lapangan (2004: 93-94).

Berdasarkan uraian tersebut, maka fokus penelitian ini adalah melakukan analisis pada kebijakan kepala daerah tentang pelaksanaan program KB di Lampung Tengah dan Lampung Barat, sebagai lokus penelitian. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan kedua daerah otonom tersebut dalam melaksanakan program KB, maka peneliti akan membandingkan antara satu dengan lainnya.

Tabel : Perangkat Analisis Model Grindle

No	A. Isi Kebijakan	Formula Implementasi Kebijakan
1	<i>Interest affected</i> (kepentingan yang mempengaruhi).	Kepentingan apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan program KB?
2	<i>Type of benefits</i> (tipe manfaat).	Apa manfaat implementasi kebijakan KB bagi pemerintah maupun bagi masyarakat?
3	<i>Extent of change envision</i> (derajat perubahan yang ingin dicapai).	Sejauhmana derajat perubahan yang ingin dicapai dalam mengimplementasikan kebijakan program KB?
4	<i>Site of decision making</i> (letak pengambilan keputusan)	Di mana letak pengambil kebijakan program KB yang akan diimplementasikan?
5	<i>Program implementer</i> (pelaksana program)	Siapakah pelaksana kebijakan program KB yang akan diimplementasikan?
6	<i>Resources committed</i> (sumber-sumber daya yang digunakan)	Apa saja sumberdaya yang mendukung untuk mengimplementasikan program KB?
	B. Konteks Kebijakan	
1	<i>Power, interest, and strategy of actor involved</i> (kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat).	Bagaimana pengaruh kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari pelaku program KB?
2	<i>Institution and regime characteristic</i> (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa).	Bagaimana karakteristik lembaga dan pengaruh lingkungan dalam mengimplementasikan program KB?
3	<i>Compliance and responsiveness</i> (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana).	Bagaimana tingkat kepatuhan dan respon pelaksana program KB?

No	Hasil Kebijakan	Hasil Program KB
1	Dampak pada masyarakat, individu, dan kelompok.	Bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh program KB terhadap masyarakat, individu, dan kelompok?
2	Perubahan dan penerimaan oleh masyarakat.	Bagaimana perubahan dan penerimaan masyarakat terhadap program KB?
No	Mengukur Keberhasilan	Implementasi Program KB
1	Program aksi dan proyek individu yang didesain dan dibiayai.	Seberapa besar biaya program KB yang dikururkan oleh pemerintah?
2	Tujuan yang ingin dicapai.	Apa tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan program KB?
3	Tujuan kebijakan.	Apa tujuan kebijakan program KB?

Dari empat perangkat analisis diatas, pada penyajian analisis hasil penelitian akan dikelompokan menjadi tiga yaitu: isi kebijakan, hasil kebijakan dan mengukur keberhasilan, dengan pertimbangan bahwa pada pelaksanaan program KB antara isi kebijakan dengan kontek kebijakan terdapat kemiripan dan dan dalam analisisnya bisa disatukan.

3.9 Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar“ yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Laporan atau data di lapangan dituangkan dalam uraian yang lengkap dan terinci. Dalam mereduksi data, peneliti dapat menyederhanakan kualitatif dengan membuat ringkasan dan memberi kode.

3.10 Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dalam penelitian. Penyajian data

dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.